



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR RI  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TANGGAL 15 NOVEMBER 2019**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Kunjungan Komisi II DPR RI ini adalah dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan fungsi Dewan, yaitu fungsi Pengawasan. Secara khusus Kunjungan Komisi II DPR RI Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terkait penyelesaian DPT, kesiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang akan datang dan penyelesaian KTP elektronik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang keempat pada 23 September 2020. Pilkada diikuti 270 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu Provinsi yang akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Walikota ada di 7 daerah yaitu: Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Balangan, kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.

Seluruh stakeholders yang terkait dalam pilkada serentak tahun 2020 mengharapkan penyelenggaraan pilkada berjalan lancar dan aman sehingga pilkada akan menjadi ajang pesta demokrasi rakyat dalam menentukan aspirasi masyarakat untuk memilih pemimpin di daerahnya.

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 merupakan salah satu wujud pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Semakin tinggi partisipasi

masyarakat menunjukkan meningkatnya pemahaman akan masalah-masalah politik serta kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada penyelenggaraan Pilkada 2020, kepemilikan KTP el merupakan syarat wajib bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi menjadi pemilih. Meskipun sampai saat ini belum semua masyarakat yang mempunyai hak pilih telah memiliki KTP el. Saat melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah anggota Komisi II DPR RI kerap kali menemukan proses perekaman dan pencetakan KTP el yang belum selesai di berbagai daerah yang turut menjadi perhatian khusus Komisi II DPR RI.

Pilkada adalah pintu menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan demokratis. Disamping itu Pilkada juga merupakan wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik dalam menentukan figur dan arah kepemimpinan daerahnya. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pilkada haruslah demokratis dan diimbangi dengan kesiapan yang matang setiap daerah untuk melaksanakan pilkada, serta koordinasi yang terus menerus antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya terkait dengan netralitas ASN, pelaksanaan setiap tahapan pilkada seperti sengketa pencalonan, kampanye, dan debat publik, hingga koordinasi dengan aparat keamanan guna mendeteksi secara dini setiap potensi ancaman keamanan.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan ini berjumlah 15 orang anggota yang dipimpin oleh Yth. **Bpk. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung** (Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Golkar) dan anggota Tim terdiri dari:

NO.	NO. ANGGT	N A M A	KETERANGAN
1.	A-270	H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung	Ketua Tim/Ketua Komisi II DPR RI/F- PG
2.	A-467	H. Moh. Arwani Thomafi	Wakil Ketua/F- PPP
3.	A-152	H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc	Anggota/F- PDIP
4.	A-219	Johan Budi S. Pribowo	Anggota/F- PDIP
5.	A-186	Paryono, SH.,MH.	Anggota/F-PDIP
6.	A-273	Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA	Anggota/F-PG
7.	A-308	Teti Rohatiningsih, S.Sos	Anggota/F-PG
8.	A-116	R. Imron Amin, SH.,MH	Anggota/F- Gerindra
9.	A-384	M. Syamsul Luthfi, SE	Anggota/F- Nasdem

10.	A-370	Lestari Moerdijat	Anggota/F- Nasdem
11.	A-30	H. Sukamto, SH	Anggota/F- PKB
12.	A-538	H. Agung Budi Santoso, SH.MM	Anggota/F- PD
13.	A-422	Dr. H. Mardani Ali Sera	Anggota/F- PKS
14.	A-455	KH. Aus Hidayat Nur	Anggota/F- PKS
15.	A-518	Mitra Fakhruhin MB	Anggota/F- PAN

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ini juga didampingi oleh Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, TV Parlemen dan Pemberitaan DPR RI

## **B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK**

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 15 November 2019 dan telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

## **C. HASIL KUNJUNGAN**

PERSIAPAN DAN KESIAPAN KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM MENGHADAPI PILKADA TAHUN 2020

Dasar Hukum:

1. UU No. 10 Tahun 2016
2. UU No. 7 Tahun 2017
3. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019

Tahapan Pemilihan terdiri dari persiapan penyelenggaraan dan tahapan penyelenggaraan.

Kesiapan Pemilihan Tahun 2020, terdiri dari:

1. Anggaran pemilihan
2. Regulasi pemilihan
3. Sumber daya manusia penyelenggara pemilihan
4. Logistic dan perlengkapan lainnya

Tahapan Persiapan Penyelenggaraan meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan
4. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
5. Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan dan Pengawas TPS
6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan
7. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

Tahapan Persiapan Penyelenggaraan

1. Perencanaan Program dan Anggaran: Penyusunan dan Penandatanganan NPHD, Pengelolaan program dan anggaran, telah terlaksana terakhir tanggal 3 September, Pelaksana: KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota
2. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan  
Terakhir tanggal 31 Agustus 2020, sebagian telah tersedia dan sebagian on process perubahan
3. Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota  
Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih, sesuai kewenangan di masing-masing tingkat. Sebagian keputusan telah terlaksana sesuai tahapan seperti:
  - a. Penetapan Hari Pemungutan Suara
  - b. Penetapan jadwal, tahapan, program
  - c. Pedoman teknis penetapan syarat minimal pencalonan dan sebaran
  - d. Penetapan syarat minimal pencalonan dan sebaran
4. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan  
Terakhir tanggal 31 Agustus 2020, sesuai kewenangan masing-masing.
  - a. Sebagian telah terlaksana, seperti sosialisasi Tata Cara Pendaftaran dan Pemberitahuan Pemantau Pemilihan, Pelaksana Jajak Pendapat/Survei, dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
  - b. Dalam proses pelaksanaan sosialisasi tahapan, sayembara jingle, sayembara logo, dan sayembara maskot pemilihan.
  - c. Dalam proses finalisasi Pedoman Teknis:
    - Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
    - Pedoman teknis pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan.
5. Pembentukan PPK: tanggal 1-31 Januari 2020, PPS: 21 Februari – 21 Maret 2020 dan KPPS: 21 Juni-21 Agustus 2020, yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota

6. Pemberitahuan dan Pendaftaran:

- Pemantau Pemilihan : 1 November 2019-16 September 2020
- Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat : 1 November 2019 – 23 Agustus 2020
- Pelaksana Penghitungan Cepat : 1 November 2019 – 23 Agustus 2020

Sesuai cakupan kewenangan di masing-masing tingkatan dalam pelaksanaan Pemilihan. Telah diumumkan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberitahuan Pemantau Pemilihan, Pelaksana Jajak Pendapat/Survei, dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan. Belum terdapat satupun pendaftar pemantau pemilihan.

7. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (*mulai dari Penerimaan DP4 sampai dengan Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu Tahun 2019*), tanggal 20 Februari – 27 Maret 2020, dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
8. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih (*mulai dari Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS sampai dengan Pengumuman DPT oleh PPS*), tanggal 27 Maret – 22 September 2020 dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS

Kesiapan Anggaran Pemilihan:

Telah disusun dan penandatanganan NPHD

<b>Daerah</b>	<b>Tanggal NPHD</b>	<b>Usulan (Rp)</b>	<b>Disetujui (Rp)</b>
Provinsi Kalsel	30 September 2019	201.152.530.000	150.000.000.000
Banjarmasin	16 September 2019	32.248.197.700	32.248.197.700
Banjarbaru	2 Oktober 2019	20.602.222.000	18.000.000.000
Banjar	14 Oktober 2019	49.976.477.688	40.961.672.000
Hulu Sungai Tengah	1 Oktober 2019	27.246.461.320	22.000.000.000
Tanah Bumbu	30 September 2019	30.886.883.166	32.924.028.350
Kotabaru	1 Oktober 2019	35.000.000.000	34.924.028.350
Balangan	30 September 2019	25.560.961.875	18.000.000.000

Pengelolaan Program dan Tersedia Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 2020:

Pencairan TA 2019 : 1.900.000.000,-  
Pencairan TA 2019 : 148.100.000.000,-  
Jumlah : 150.000.000.000,-

Pengelolaan Program dan Anggaran Pemilihan

Daerah	Tahun Anggaran 2019	Tahun Anggaran 2020	Tanggal Pengajuan Pencairan Tahun Anggaran 2019	Keterangan
Kalimantan Selatan	1.900.000.000	148.100.000.000	04 November 2019	Sudah Pencairan
Banjarmasin	12.899.279.080	19.348.918.620	25 Oktober 2019	Sudah Pencairan
Banjarbaru	1.000.000.000	17.000.000.000	22 Oktober 2019	Sudah Pencairan
Banjar	200.000.000	40.761.672.000		Belum Pencairan
Hulu Sungai Tengah	750.000.000	21.250.000.000	23 Oktober 2019	Sudah Pencairan
Kotabaru	1.700.209.000	33.223.819.350	6 November 2019	Belum Pencairan
Tanah Bumbu	2.800.000.000	23.200.000.000	23 November 2019	Sudah Pencairan
Balangan	4.000.000.000	14.000.000.000	23 Oktober 2019	Sudah Pencairan

### **Kesiapan Regulasi Pemilihan**

UU Nomor 10 Tahun 2016

PKPU Nomor 15 Tahun 2019

PKPU Nomor 8 Tahun 2017

PKPU Nomor 15 Tahun 2017

PKPU terkait lainnya; dan

Keputusan KPU Nomor 1396/HK.02-Kpt/03/KPU/X2019 tentang Rencana Penyusunan Rancangan PKPU Tahun 2020 kurang lebih Rancangan PKPU Tahun 2020

Kesiapan Sosialisasi Kepada Masyarakat

1. Telah dilakukan sosialisasi:

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberitahuan Pemantau Pemilihan Pelaksana Jajak Pendapat/Survei, dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota melalui:

- Media sosial dan website KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kab/Kota

- Pameran Pelayanan Publik, Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan
- Papan Pengumuman KPU Provinsi Kalsel dan Kab/Kota

Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan Pencalonan Perseorangan melalui media sosial dan website KPU Provinsi dan Kab/Kota, Stakeholders (undangan sosialisasi kelompok/Asosiasi pendukung bagi bakal calon perseorangan), dan papan pengumuman:

2. Sedang proses finalisasi:

- Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
- Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

3. Sedang terlaksana tahapan proses sosialisasi:

- Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan di 6 Kabupaten/Kota yang tidak menyelenggarakan Pemilihan
- Sayembara Logo
- Sayembara Maskot
- Sayembara Jingle
- Launching Pemilihan

Telah disusun dalam Perencanaan dan Program untuk sosialisasi:

1. Tahapan Pemutakhiran data dan daftar Pemilih, terkait:

- Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
- Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih
- Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
- Penyusunan daftar Pemilih

2. Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan, terkait:

- Jadwal pencalonan Pasangan Calon
  - Persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon
  - Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon
  - Penetapan Pasangan Calon; dan
  - Pengundian dan Penetapan nomor urut Pasangan calon

3. Tahapan Kampanye dalam Pemilihan:

- Ketentuan Kampanye
- Jadwal Kampanye; dan
- Visi, misi dan program kerja Pasangan Calon

4. Tahapan Dana Kampanye peserta Pemilihan:
  - Jadwal penyampaian laporan dana kampanye
  - Jenis Laporan dana kampanye
  - Penyusunan laporan dana kampanye; dan
  - Audit dan hasil audit dana kampanye
5. Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pemilihan dan:
  - Tata cara pemungutan suara
  - Tata cara penghitungan suara
  - Rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
  - Pengumuman hasil pemilihan
6. Tahapan Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan
  - Dari tahapan tahapan yang terencana untuk disosialisasikan tersebut dilakukan dengan berbagai bentuk dan metode, Namun, jumlah/intensitas, bentuk dan metode sosialisasi dalam Perencanaan dan Program Anggaran tersebut dapat berdampak pengurangan, ketersediaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan kenaikan honorarium PPK, PPS dan KPPS serta Sekretariat PPK dan PPS dan prioritas tahapan teknis penyelenggaraan pemilihan
  - Harapan: dukungan semua pihak membantu menunjang maksimalisasi sosialisasi dan Pendidikan pemilihan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama dukungan Pemerintah Daerah.
7. Kesiapan Penyuluhan, Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilihan/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja
  - a. Telah dilakukan Bimbingan Teknis:
    - Penyusunan Keputusan kepada KPU Kabupaten/Kota penyelenggara Pemilihan
    - Penetapan Syarat Minimal Dukungan dan Sebaran Pencalonan Perseorangan
  - b. Telah dilakukan Rapat Koordinasi:
    - Persiapan Sosialisasi Tahapan Pemilihan; dan
    - Persiapan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS kepada 13 Kab/Kota
  - c. Akan diselenggarakan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilihan pada tahun anggaran 2020

Kesiapan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pemilihan

SDM Penyelenggara Pemilihan



- Jumlah Anggota:
  - KPU Provinsi Kalimantan Selatan : 5 orang
  - 13 KPU Kabupaten/Kota : 65 orang
  
- Jumlah ASN lingkup KPU di Kalimantan Selatan, dengan sebaran dan rincian:
  - KPU Provinsi Kalimantan Selatan, sejumlah 59 orang, dengan rincian:
    - ASN Organik : 18 orang
    - ASN Dipekerjakan (DPK dari Pemda): 18 orang
    - Tenaga Honorer : 16 orang
    - Honorer : 7 orang
  
- 13 KPU/Kabupaten/Kota
  - ASN Organik : 111 orang
  - ASN Dipekerjakan : 78 orang
  - Tenaga Pendukung : .....
  - Honorer : .....

#### Pembentukan Badan ad Hoc Pemilihan dan Kebutuhan Dukungan ASN

- PPK, PPS dan KPPS Belum terbentuk
- Sesuai Tahapan, Program dan Jadwal Pembentukan:
  - PPK : 1 -31 Januari 2020
  - PPS : 21 Februari – 21 Maret 2020
  - KPPS : 21 Juni – 21 Agustus 2020
- Kebutuhan Anggota:
  - PPK : 765 dari 159 Kecamatan
  - PPS : 6024 dari 2008 Kel/desa
  - KPPS : 62.251 dari 8893 TPS
  - PAM TPS : 17.786 dari 8893 TPS
- Kebutuhan ASN di Sekretariat:
- Jumlah keseluruhan keutuhan SDM untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PAM TPS sebanyak 86.826 WNI dan ASN untuk diperbantukan di Sekretariat PPK dan PPS sebanyak 6483 ASN

#### Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih

##### Jadwal

- Penerimaan DP4: 20-23 Februari 2020
- Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4: 24 Februari – 22 Maret 2020
  - Penyampaian Hasil Sinkronisasi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota: 23 – 26 Maret 2020
- Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan PDT Terakhir: 27 Maret 2020; dan

- Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih: berlangsung mulai 27 Maret – rekapitulasi DPT tingkat Provinsi 20 Juli 2020.

Kesiapan Pemutakhiran Data Pemilih:

KPU Provinsi Kalimantan Selatan smpa melaksanakan Pemutakhiran data Pemilih sesuai tahapan, jadwal dan program yang ditentukan PKPU Nomor 15 Tahun 2019

Memastikan DPT Bersih, Akurat dan Valid:

Optimalisasi:

- Penggunaan fungsi SIDALIH untuk mendeteksi pemilih ganda
- Kinerja Pantarlih, PPS, PPK dan KPU Kab/Kota mendeteksi/menyisir pemilih berpotensi fiktif
- Penguatan pemahaman dan budaya kerja pemutakhiran data pemilih melalui Bimbingan teknis berjenjang kepada KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan Pantarlih
- Melakukan pencocokan dan penelitian secara administrative dan factual menyeluruh terhadap data pemilih
- Sosialisasi sehingga WNI ikut berpartisipasi memantau, mengawasi, emmonitor data pemilih
- Sosialisasi setiap tahapan dan proses pemutakhiran data pemilih sehingga mendapatkan control dan masukan/tanggapan publik atas ata pemilih yang dimutakhirkan; dan
- Pengumuman data pemilih secara berjenjang melalui papan pengumuman, media sosial dan web KPU Prov/Kab/Kota dan pada tempat-tempat yang mudah diakses publik
- Bekerjasama dengan masyarakat sipil, perguruan tinggi dan elemen-elemen pendukung lainnya untuk melakukan pendidikan pemilih dan sosialisasi hal-hal penting dan utama terntang data pemilih. Terutama terhadap wilayah-wilayah sulit akses secara geografis, tanpa alat transportasi, jaringan internet, dan media massa dan
- Bersinergi dengan Pengawas Pemilihan atas hasil pengawasannya.

Pada saat proses ccklit pemutakhiran data pemilih oleh Patarlih, pemilih harus menunjukkan identitas kependudukan KTP-E/Surat Keterangan telah melakukan perekaman dari DINas Kependudukan dan Catatan Sipil. Melakukan uji validitas data pemilih berbasis TPS untuk memastikan validitas dan akurasi data pemilih.

Upaya Pemilih Pemula Terdata Dalam Daftar Pemilih:

- Memastikan akurasi hasil sanding dari DP4 dengan DPT Pemilu Tahun 2019 dengan melakukan verifikasi oleh Pantarlih dan PPS

- Memaksimalkan sinergitas KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berjenjang mengkoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil cakupan setempat untuk mendorong Pemilih Pemula yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum memiliki KTP-E untuk dilakukan perekaman
- Membuka Posko Pelaporan/Tanggapan Publik atas Data Pemilih di KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS sebagai ruang advokasi follow up pelaporan data pemilih.
- Memaksimalkan sosialisasi pentingnya hak pilih dan memantik kesadaran basis basis pemilih pemula
- Melanjutkan program Gerakan Melindungi Hak Pilih; dan
- Merawat sinergitas dengan Pengawas Pemilihan dalam mengawasi pemutakhiran data pemilih.

Logistik dan Kelengkapan Pemilihan:

Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara akan berlangsung mulai 15 Juni – 22 September 2020.

## **PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan. Seluruh masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI menjadi masukan dan catatan bagi Komisi II DPR RI dan akan disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait yang menjadi mitra Komisi II DPR RI sesuai kewenangannya. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2019

**Ketua Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI**

**H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung**